

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang cepat selama beberapa waktu belakangan ini, ditandai dengan semakin meningkatnya angka penyalahgunaan informasi dan pengelolaan data dalam berbagai aspek kehidupan setiap individu. Baru-baru ini perusahaan e-commerce Traveloka yang bekerja sama dengan perusahaan fintech mengeluarkan layanan terbarunya yaitu fitur Paylater, dimana para penggunanya dapat berbelanja terlebih dahulu kemudian pembayarannya akan ditalangi oleh Traveloka. Kemudahan cara mendaftar contohnya syarat yang diperlukan seperti data pribadi berupa e-ktp dan foto pribadi ini juga membuat layanan Paylater itu sendiri memiliki kerentanan untuk dilakukan upaya peretasan yang berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Banyak kasus peretasan yang berakibat data pribadi korban dicuri dan disalahgunakan ini tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas, karena memang aturan yang ada tidak mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk menejerat pelaku peretasan berujung pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban dengan melakukan penafsiran hukum secara ekstensif mengenai definisi data pribadi itu sendiri dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Peretasan, Data Pribadi, *Paylater*, UU ITE

**ABSTRACT**

*Rapid technological developments over the past few years, marked by the increasing misuse of information and data management in various aspects of each individual. Recently, the e-commerce company named Traveloka in collaboration with the fintech company released its newest service, the Paylater feature, where users could buy anything and then the payment will be bailed out by Traveloka. The ease of how to register, for instance, the required conditions such as personal data in the form of E-KTP and personal photos also make the Paylater service itself vulnerable to hacking that result in misuse of the victim's personal data. Many cases that result in the victim's personal data being stolen and misused, it did not get a clear solution because the existing rules do not comprehensively regulate criminal sanctions for the criminal offenders. This study aims to examine the provisions of the regulation that could be used to deter hackers who is resulting in theft and misuse of the victim's personal data by extensively interpreting the law regarding the definition of personal data itself in the Law on Electronic Information and Transactions.*

**Keyword:** *Hacking, Personal Data, Paylater, Information and Transaction Electronic*